



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
UNIT KERJA : PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ACHMAD SUKRONI**
2. Jabatan : **KEPALA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI**
3. NHK : **461004**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.350.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m²/80 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 35 m²/35 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 110.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA S 1.5 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA CS 1 Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT BEAT PRO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 45.000.000**

D. SURAT BERTAHAGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 85.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.590.000.000**

III. HUTANG **Rp. 20.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 1.570.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.